

RINGKASAN

**Suwandi Narayana
210510158**

**Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Penyuap
Bupati Dalam Kasus Proyek Pemerintah (Putusan
Nomor:17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn)
(Dr. Budi Bahreisy, S.H.,M.H dan Dr. Zainal Abidin,
S.H., M.H)**

Kasus suap menyuap menjadi permasalahan yang hingga saat ini masih terus ada, yang bahkan dianggap seperti budaya dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Apabila ditarik ke masa yang lalu, fakta menunjukkan bahwasannya terjadi banyak kasus penyuapan yang dilakukan oleh pejabat negara, pada prakteknya yang menjadi bahan suap yaitu berupa uang. Sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana suap menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyuapan terhadap bupati dalam kasus proyek pemerintah berdasarkan putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn dan Untuk menganalisis dan mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku penyuap bupati dalam kasus proyek pemerintah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn masih terdapat kekurangan dalam menjatuhkan pemidanaan dan pertimbangan hakim terhadap terdakwa dan hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana yang tegas dan mempertimbangkan dari segala aspek. Termasuk mempertimbangkan terdakwa pernah dihukum dengan kasus tindak pidana suap terhadap bupati sebelumnya.

Disarankan dalam menjalankan kegiatan usaha harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Internal Perusahaan. Setiap perusahaan juga harus senantiasa transparan, akuntabel, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan menghindari konflik kepentingan dalam mengambil keputusan dan melakukan transaksi baik berupa tender atau yang lainnya.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Suap, Proyek Pemerintah.

SUMMARY

Suwandi Narayana 210510158 ***Analysis of Court Decisions Against Regent Bribers in Government Project Cases (Decision Number: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn)***
(Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H and Dr. Zainal Abidin, S.H., M.H)

Bribery cases continue to be a problem that persists to this day, and is even considered part of Indonesian culture. Looking back, facts show that there have been many cases of bribery committed by state officials, with money being the most common form of bribe. According to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption, anyone who unlawfully enriches themselves or others or a corporation in a manner that could harm the state finances or economy shall be punished with life imprisonment or a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years and a fine of at least Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

The purpose of this research is to analyze and find out what are the considerations of judges in deciding cases of bribery of regents in government project cases based on decision number 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn and to analyze and find out what are the considerations of judges in deciding cases against perpetrators of criminal acts of bribery of regents in government project cases.

The type of research used in writing this thesis is normative juridical research using a case approach, statutory approach, and conceptual approach.

The results of this study indicate that based on Decision Number 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn there are still shortcomings and considerations of the judge against the defendant and the judge did not impose strict criminal sanctions and consider all aspects. Including considering that the defendant had been convicted in a previous case of bribery against the regent.

It is recommended that in conducting business activities, companies must always comply with applicable laws and regulations, including Internal Company Regulations. Every company must also be transparent, accountable, and comply with the principles of good corporate governance and avoid conflicts of interest in decision-making and the execution of transactions, whether in the form of tenders or otherwise.

Keywords: Court Rulings, Bribery, Government Projects.